

Katalog: 4102804.21

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

INDIKATOR

KESEJAHTERAAN RAKYAT

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2020



**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2020**

ISSN : 2442-6199
No. Publikasi : 21000.2114
Katalog : 4102004.21

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : xiv + 94 halaman

Naskah:
Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Penyunting:
Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Desain Kover:
Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Diterbitkan Oleh:
© Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Pencetak Oleh:
CV. Berkah Mandiri

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan
komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

Pengarah

Agus Sudibyo

Penanggung Jawab

Zunadi

Editor

Nur Ikhlas

Naskah

Utary Hafiza

Pengolah Data

Nur Ikhlas

Utary Hafiza

Infografis

Nur Ikhlas

Desain Kover dan Layout

Utary Hafiza



KATA PENGANTAR

Publikasi “Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Provinsi Kepulauan Riau 2020” merupakan publikasi yang disajikan berkala setiap tahun. Publikasi ini menyajikan tingkat kesejahteraan rakyat Provinsi Kepulauan Riau antarwaktu dan perbandingannya antarkabupaten/kota serta antar-daerah perkotaan dan pedesaan. Data yang digunakan, bagian terbesar dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) keadaan bulan Agustus 2020 (terutama data ketenagakerjaan). Namun demikian, sebagian kecil juga menggunakan data dari sumber lain (data sekunder).

Publikasi ini hanya mencakup pada aspek - aspek yang dapat diukur dan datanya tersedia, seperti: kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan, kemiskinan, serta sosial budaya.

Publikasi ini terwujud berkat kerja keras tim penyusun dari BPS Provinsi Kepulauan Riau dan dengan dukungan para sumber data baik primer maupun sekunder. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, dengan harapan agar upaya penyempurnaan terus dilakukan secara profesional. Selanjutnya kepada semua pihak yang secara aktif memberikan sumbangsih hingga terbitnya publikasi ini, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan penyajian serupa di masa mendatang..

Badan Pusat Statistik
Provinsi Kepulauan Riau
Kepala,



Agus Sudibyo, M.Stat

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xiii
Bab 1. Kependudukan	1
1.1. Pendahuluan.....	3
1.2. Laju Pertumbuhan Penduduk	4
1.3. Distribusi Penduduk.....	5
1.4. Komposisi Penduduk	6
Bab 2. Kesehatan dan Gizi	9
2.1. Pendahuluan	11
2.2. Derajat dan Status Kesehatan Penduduk	13
2.3. Tingkat Imunitas dan Gizi Balita	19
2.4. Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan	21
Bab 3. Pendidikan	25
3.1. Pendahuluan	27
3.2. Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah.....	29
3.3. Tingkat Pendidikan	31
3.4. Tingkat Partisipasi Sekolah	32
3.5. Kualitas Layanan Pendidikan	34

Bab 4. Ketenagakerjaan.....	39
4.1. Pendahuluan	41
4.2. Angkatan Kerja	43
4.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	44
4.4. Penduduk Yang bekerja	45
4.4.1. Lapangan Pekerjaan	45
4.4.2. Status Pekerjaan.....	47
4.4.3. Jam Kerja.....	49
4.4.4. Pendidikan.....	50
4.5. Tingkat Pengangguran	51
Bab 5. Taraf dan Pola Konsumsi	55
5.1. Pengeluaran Rumah Tangga	57
5.2. Konsumsi Kalori dan Protein	60
Bab 6. Perumahan dan Lingkungan	63
6.1. Pendahuluan	65
6.2. Kualitas Rumah Tinggal	67
6.3. Kelengkapan Fasilitas Pokok Rumah.....	70
Bab 7. Kemiskinan	75
7.1. Perkembangan Penduduk Miskin	77
7.2. Garis Kemiskinan	78
7.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.....	81

Bab 8. Sosial Lainnya	85
8.1. Pendahuluan	87
8.2. Perlindungan Sosial	87
8.3. Akses pada Informasi	89
8.4. Keadaan Sosial Ekonomi Rumah Tangga	90
8.5. Tindak Kejahatan	94

<https://kepri.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Jumlah Penduduk dan LPP Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota, 2010, 2019, dan 2020	4
Tabel 1.2. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota, 2020.....	6
Tabel 1.3. Penduduk Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2020	7
Tabel 2.1. Perkembangan UHH menurut Kabupaten/Kota, 2015–2020	14
Tabel 2.2. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan selama Sebulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Kepulauan Riau, 2019-2020.....	17
Tabel 2.3. Persentase Balita yang Pernah Diimunisasi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2020.....	21
Tabel 2.4. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat di Kepulauan Riau, 2020.....	22
Tabel 5.1. Persentase Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan Per Kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran di Kepulauan Riau, 2020.....	58
Tabel 5.2. Rata-Rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari menurut Daerah Tempat Tinggal di Kepulauan Riau, 2019-2020	61

Tabel 6.1.	Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kepulauan Riau, 2020.....	70
Tabel 6.2.	Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kepulauan Riau, 2020.....	74
Tabel 7.1.	Garis Kemiskinan menurut Makanan dan Bukan Makanan, 2019-2020.....	81
Tabel 7.2.	Struktur Pengeluaran Rumah Tangga Miskin Menurut Perkotaan dan Pedesaan, September 2020.....	82
Tabel 7.3.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keperahan Kemiskinan(P2), September 2020.....	84
Tabel 8.1.	Persentase Penduduk yang Menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dalam Setahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau, 2020.....	88
Tabel 8.2.	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet selama 3 Bulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau, 2020.....	90
Tabel 8.3.	Persentase Rumah Tangga yang Membeli/Menerima Beras Sejahtera (Bansos Rastra) Selama 4 Bulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau, 2020	91
Tabel 8.4.	Pemanfaatan Raskin oleh Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Kg Beras yang Dibeli selama 4 Bulan di Kepulauan Riau, 2020 (Persen)	92
Tabel 8.5.	Persentase Rumah Tangga yang Pernah dan Tidak Menerima Kredit Usaha Selama Satu Tahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota Kepulauan Riau, 2020.....	93

Tabel 8.6.	Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Setahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Kepulauan Riau, 2020.....	94
------------	---	----

<https://kepri.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Piramida Penduduk Kepulauan Riau, 2020	8
Gambar 2.1. Perkembangan UHH di Indonesia dan Kepulauan Riau, 2015 – 2020 (Tahun).....	13
Gambar 2.2. Perkembangan UHH per Tahun menurut Kabupaten/Kota selama 2016 – 2020 (%)	15
Gambar 2.3. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan selama Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau, 2019-2020	16
Gambar 2.4. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan hingga Mengganggu Aktifitas Sehari-hari selama Sebulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau, 2019-2020.....	18
Gambar 2.5. Persentase Baduta yang Pernah Diberi ASI menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau, 2020.....	20
Gambar 3.1. HLS dan RLS Provinsi Kepulauan Riau, 2016-2020.....	30
Gambar 3.2. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Kepulauan Riau, 2020.....	31
Gambar 3.3. APS Usia Penduduk 7-18 Tahun menurut Kelompok Usia Sekolah di Kepulauan Riau, 2018-2020 (%)	33
Gambar 3.4. APM Penduduk menurut Kelompok Usia Sekolah di Kepulauan Riau, 2018-2020 (%).....	34

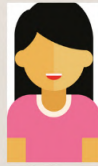
Gambar 3.5.	Rasio Murid-Guru di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019/2020.....	36
Gambar 4.1.	Angkatan Kerja di Kepulauan Riau, Agustus 2020	43
Gambar 4.2.	TPAK di Kepulauan Riau, Agustus 2018 – Agustus 2020.....	44
Gambar 4.3.	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kepulauan Riau, Agustus 2019 – Agustus 2020 (%).....	47
Gambar 4.4.	Penduduk Usiaa 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama di Kepulauan Riau, Agustus 2019 – Agustus 2020 (Orang).....	48
Gambar 4.5.	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja per Minggu di Kepulauan Riau, Agustus 2019 dan Agustus 2020 (Orang).....	49
Gambar 4.6.	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kepulauan Riau, Agustus 2019 dan Agustus 2020 (Orang).....	51
Gambar 4.7.	TPT Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kepulauan Riau, Agustus 2019 – Agustus 2020 (%).....	53
Gambar 5.1.	Proporsi Pengeluaran Penduduk Provinsi Kepulauan Riau menurut Kuantil, 2020 (%).....	59
Gambar 5.2.	Perkembangan <i>Gini Ratio</i> , Maret 2015 – September 2020	60
Gambar 7.1.	Angka Kemiskinan Kepulauan Riau, Maret 2019 - September 2020.....	78

1

KEPENDUDUKAN



1.053.296



1.011.268

SEX RATIO =
104

JUMLAH PENDUDUK
Total 2.064.564



BAB I

KEPENDUDUKAN

1.1. Pendahuluan

Penduduk dalam pembangunan mempunyai peran sebagai pelaku (subjek) dan juga sebagai tujuan (objek). Suatu pembangunan dapat dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas (misalnya mengurangi jumlah penduduk miskin, menurunkan tingkat pengangguran, dan menyediakan pendidikan yang terjangkau bagi semua penduduk).

Keadaan kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan, jumlah penduduk yang besar diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai, akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, pembangunan kependudukan memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan, terutama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Selama Periode tahun 2010-2020 (lihat Tabel 1.1.), Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Provinsi Kepulauan Riau sebesar 2,02 persen per tahun. Jika dilihat LPP kabupaten/kota, persentasenya cukup bervariasi. Kota Batam dan Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai LPP paling besar yaitu sebesar 2,32 persen, sedangkan Kabupaten Bintan mempunyai LPP yang terkecil yaitu, sebesar 1,11 persen.

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk dan LPP Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota, 2010, 2019, dan 2020

Kabupaten/ Kota	Penduduk (persen)			LPP
	2010	2019	2020	2010 - 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Karimun	213 479	232 797	232 797	1,72
Bintan	143 020	159 403	159 403	1,11
Natuna	69 416	77 771	77 771	1,62
Lingga	86 513	89 781	89 781	1,31
Kep. Anambas	37 629	42 309	42 309	2,32
Batam	954 450	1 376 009	1 376 009	2,32
Tanjungpinang	188 309	211 583	211 583	1,90
Kepri	1 692 816	2 189 653	2 064 564	2,02

Sumber Data : BPS, Kepulauan Riau Dalam Angka 2021

Pertumbuhan penduduk Kota Batam yang sangat tinggi disebabkan oleh migrasi masuk penduduk dari luar Provinsi Kepulauan Riau yang bertujuan untuk bekerja, mencari pekerjaan, dan melakukan kegiatan usaha atau kegiatan ekonomi lainnya.

1.3 Distribusi Penduduk

Distribusi Penduduk Provinsi Kepulauan Riau sangat tidak merata antar kabupaten/kota. Sebagian besar penduduk Provinsi Kepulauan Riau tinggal di Kota Batam, yaitu sebesar 57,95 persen pada tahun 2020. Sementara itu, di Kabupaten Natuna, Lingga, dan Kepulauan Anambas hanya sebesar 3,95 persen, 4,78 persen, dan 2,30 persen.

Bila dilihat dari kepadatan penduduk, maka Kota Tanjungpinang menempati urutan pertama dengan kepadatan sebesar 1.574,87 jiwa/km², diikuti oleh Kota Batam dan Kabupaten Karimun masing-masing sebesar 1.245,92 jiwa/km² dan 277,69 jiwa /km². Sementara itu, Kabupaten Natuna, Lingga, dan Kepulauan Anambas masih di bawah 100 jiwa/km² atau selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota, 2020

Kabupaten/ Kota	Luas Daratan (Km ²)	Penduduk	Distribusi Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per Km ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Karimun	912,75	253 457	12,28	277,69
Bintan	1 318,21	159 518	7,73	121,01
Natuna	2 009,04	81 495	3,95	40,56
Lingga	2 266,77	98 633	4,78	43,51
Kep. Anambas	590,14	47 402	2,30	80,32
Batam	960,25	1 196 396	57,95	1 245,92
Tanjungpinang	144,56	227 663	11,03	1 574,87
Kepri	8 201,72	2 064 564	100	251,72

Sumber Data : BPS, Kepulauan Riau Dalam Angka 2021

1.4 Komposisi Penduduk

Beberapa permasalahan kependudukan seperti jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin harus selalu dipantau perkembangannya, Informasi yang dipilah berdasarkan jenis kelamin dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai seberapa besar jumlah penduduk perempuan dan laki-laki, Di sisi lain, informasi mengenai jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat memberikan gambaran berapa jumlah penduduk

yang termasuk dalam penduduk golongan tua ataupun golongan muda. Informasi-informasi tersebut sangat diperlukan untuk mempermudah para *stakeholder* dalam menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan yang ada.

Tabel 1.3 Penduduk Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2020

Kabupaten/Kota	L	P	L + P	Sex Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Karimun	129 761	123 696	253 457	104,90
Bintan	82 190	77 328	159 518	105,77
Natuna	41 890	39 605	81 495	106,29
Lingga	50 870	47 763	98 633	106,51
Kep. Anambas	24 502	22 900	47 402	107,00
Batam	609 399	586 997	1 196 396	103,82
Tanjungpinang	114 684	112 979	227 663	101,51
Kepri	1 053 296	1 011 268	2 064 564	104,16

Sumber Data : BPS, Kepulauan Riau Dalam Angka 2021

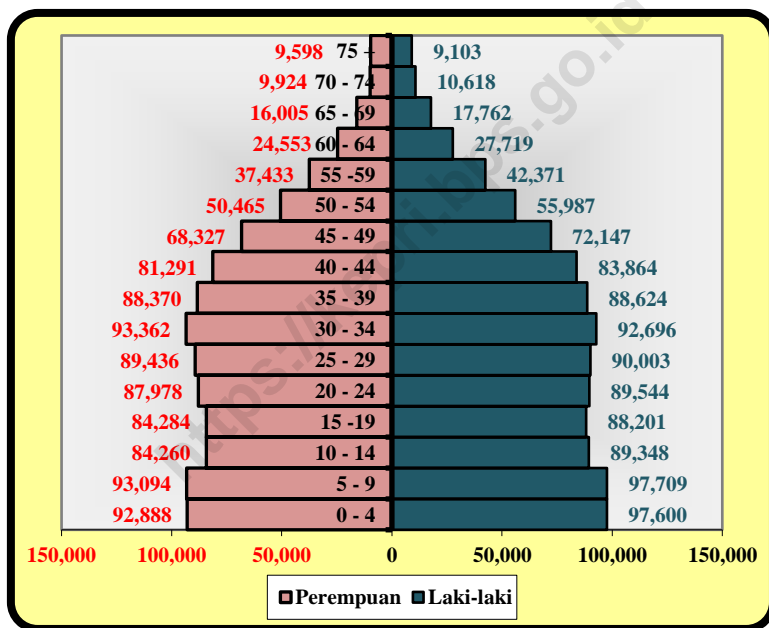
a. Sex Ratio

Sex Ratio penduduk Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 104, artinya bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan ada 104 penduduk laki-laki, Tabel 1.3 memperlihatkan *sex ratio* di semua kabupaten/kota lebih dari

100, artinya bahwa jumlah penduduk laki-laki di semua kabupaten/kota lebih besar dari penduduk perempuan.

b. Piramida Penduduk

Gambar 1.1. Piramida Penduduk Kepulauan Riau, 2020



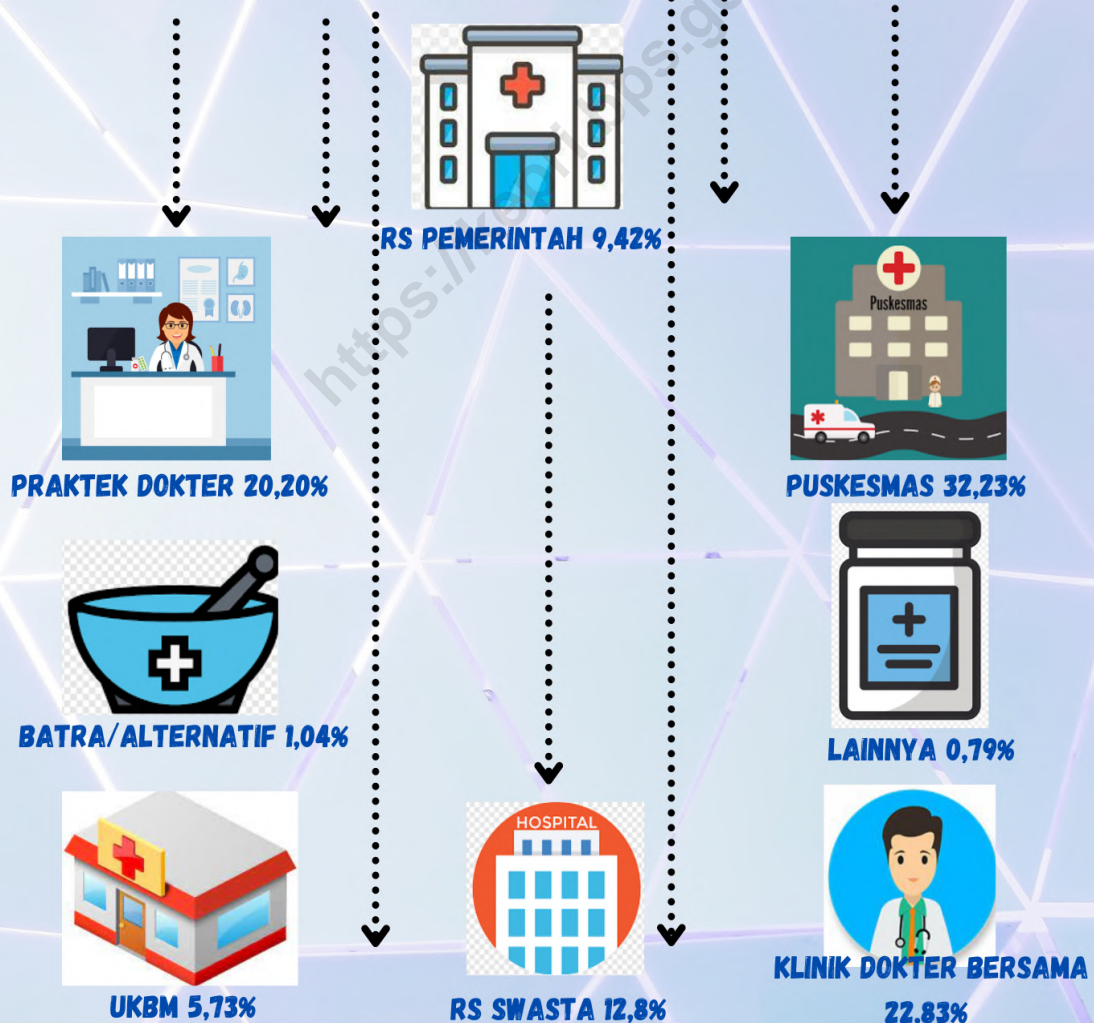
Sumber Data : BPS, Kepulauan Riau Dalam Angka 2021

Penduduk Provinsi Kepulauan Riau masih tergolong “penduduk muda” hal ini bisa dilihat dari penduduk usia 0-9 tahun yang masih besar jumlahnya (18,47 persen) dan penduduk usia 25-39 tahun juga cukup besar (26,28 persen).

2

KESEHATAN DAN GIZI

Persentase Penduduk yang Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir di Provinsi Kepri, 2020



BAB II

KESEHATAN DAN GIZI

2.1. Pendahuluan

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Indikator utama yang digunakan untuk melihat derajat kesehatan penduduk adalah angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Selain itu, aspek penting lainnya yang turut mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan yang antara lain diukur melalui angka kesakitan dan status gizi. Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan.

Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana dan prasarana dalam bidang medis termasuk

ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat perlu mendapat perhatian utama.

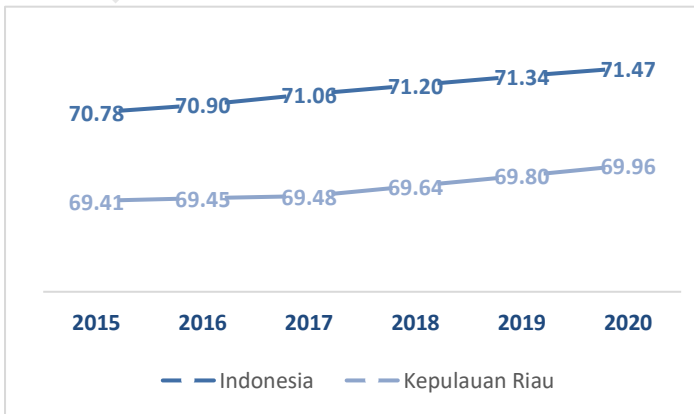
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kualitas kehidupan dan usia harapan hidup dan mempertinggi kesadaran masyarakat atas pentingnya hidup sehat. Target grup pembangunan kesehatan lebih ditekankan pada masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok masyarakat tertinggal. Untuk itu, peran serta masyarakat terus ditingkatkan melalui pengelolaan kesehatan terpadu, termasuk dunia usaha. Secara kuantitas dan kualitas, penyediaan berbagai sarana kesehatan, tenaga kesehatan, dan penyediaan obat juga terus ditingkatkan.

Kebijakan pemerintah untuk menanggulangi hambatan biaya dalam mengakses pelayanan kesehatan dilakukan dalam bentuk pemberian subsidi pelayanan kesehatan dengan Program Askeskin yang berlaku sejak 1 Januari 2005. Program ini bertujuan agar akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan.

2.2. Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk Indonesia pada tahun 2019 adalah 71,34 tahun dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 71,47 tahun. Pada tahun 2020, UHH Provinsi Kepulauan Riau sedikit lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional yang diperkirakan anak yang lahir dapat hidup rata-rata sampai usia 71,47 tahun dengan catatan bila diasumsikan bahwa kondisi kesehatan dan kematian yang ada akan berjalan seperti pada saat ini atau tidak berubah, hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Perkembangan UHH di Indonesia dan Kepulauan Riau, 2015 – 2020 (Tahun)



Sumber Data : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Jika dilihat UHH menurut kabupaten/kota pada Tabel 2.1, maka UHH pada tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Laju peningkatan UHH masing-masing kabupaten/kota bervariasi antara 0,33 persen sampai dengan 2,68 persen yang dapat dilihat pada Gambar 2.2. Laju peningkatan UHH tidak terlepas dari usaha pemerintah daerah dan elemen masyarakat dalam rangka menjamin kesehatan bersama.

Tabel 2.1. Perkembangan UHH menurut Kabupaten/Kota, 2016-2020

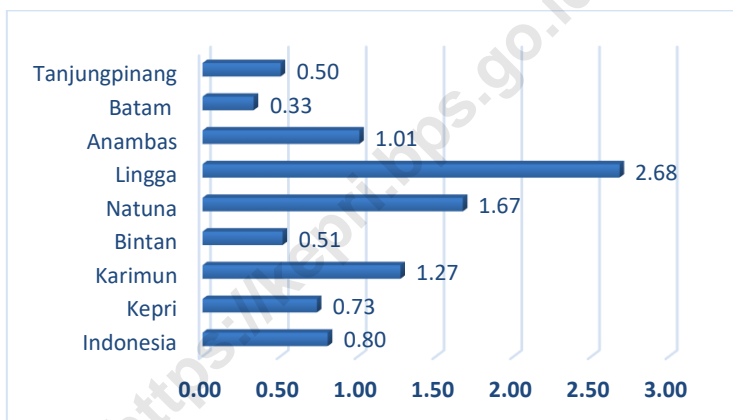
Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Karimun	70,02	70,32	70,52	70,71	70,91
Bintan	70,02	70,12	70,21	70,30	70,38
Natuna	63,99	64,33	64,57	64,81	65,06
Lingga	60,44	61,14	61,44	61,75	62,06
Kepulauan Anambas	66,54	66,76	66,91	67,06	67,21
Batam	73,09	73,19	73,24	73,29	73,33
Tanjungpinang	71,74	71,84	71,93	72,02	72,10
Prov. Kepri	69,45	69,48	69,64	69,80	69,96
Indonesia	70,90	71,06	71,20	71,34	71,47

Sumber Data : BPS, Berita Resmi Statistik IPM , 2020

Kabupaten Lingga dengan UHH terendah ternyata memiliki perkembangan UHH yang cepat dibandingkan

dengan kabupaten/kota lainnya. Sementara itu, Kota Batam yang mempunyai nilai UHH tinggi justru perkembangan UHH-nya semakin melambat.

Gambar 2.2. Perkembangan UHH per Tahun menurut Kabupaten/Kota selama 2016 – 2020 (%)



Sumber Data : BPS, Berita Resmi Statistik IPM, 2020

Status kesehatan penduduk memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk dan biasanya dapat dilihat melalui indikator angka kesakitan, yaitu persentase penduduk yang selama sebulan sebelum pencacahan Susenas 2020 mengalami gangguan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Pada Gambar 2.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 sebanyak 18,21 persen penduduk selama sebulan terakhir mengalami gangguan kesehatan sebelum

pencacahan. Nilai ini lebih rendah jika dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 21,37 persen.

Berdasarkan jenis kelamin terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk penduduk yang mengalami gangguan kesehatan, dengan nilai masing-masing sebesar 16,61 persen untuk laki-laki dan 19,87 persen untuk perempuan pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, maka penduduk baik laki-laki maupun perempuan mengalami penurunan dalam keluhan kesehatan.

Gambar 2.3. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan selama Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau, 2019 - 2020



Sumber Data : BPS, Statistik Kesra Provinsi Kepulauan Riau, 2019 dan 2020

Jika ditinjau menurut kabupaten/kota yang dapat dilihat pada Tabel 2.2, maka ternyata tingkat keluhan kesehatan sangat bervariasi. Pada tahun 2020, baik laki-laki maupun perempuan yang mengalami tingkat keluhan tertinggi adalah Kabupaten Lingga yaitu 27,74 persen dan 26,59 persen. Adapun yang terendah adalah Kabupaten Bintan sebesar 13,26 persen untuk laki-laki dan 17,26 persen untuk perempuan.

Tabel 2.2 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan selama Sebulan Terakhir menurut Kabupaten Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau, 2019-2020

Kab/Kota	2019			2020		
	Laki	Perempuan	Total	Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Karimun	21,08	26,20	23,60	20,66	25,87	23,21
Bintan	22,54	25,33	23,90	13,26	17,26	15,21
Natuna	21,99	24,23	23,08	21,53	23,28	22,38
Lingga	33,70	37,22	35,42	27,74	26,59	27,18
Kep. Anambas	12,94	16,27	14,55	18,35	20,05	19,17
Batam	17,83	21,75	19,75	14,66	17,40	16,00
Tanjungpinang	20,20	24,39	22,27	20,75	27,42	24,06
Prov. Kepri	19,45	23,36	21,37	16,61	19,87	18,21
Indonesia	30,66	34,08	32,36	29,29	32,65	30,96

Sumber Data : BPS, Statistik Kesra Provinsi Kepulauan Riau, 2019 dan 2020

Penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang menderita sakit selama sebulan terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.2 bahwa secara umum persentase perempuan lebih tinggi mengalami keluhan kesehatan dibandingkan dengan laki-laki, yaitu 19,87 persen berbanding 16,61 persen. Kemudian yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggu aktivitas sehari-hari.

Gambar 2.4 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan hingga Mengganggu Aktivitas Sehari-hari (Angka Kesakitan) selama Sebulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau, 2019 - 2020



Sumber Data : BPS, Statistik Kesra Provinsi Kepulauan Riau, 2019-2020

Berdasarkan gambar 2.4 hanya Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengalami peningkatan persentase penduduk dengan keluhan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Adapun kabupaten kota lain mengalami penurunan persentase dari tahun 2019 ke tahun 2020. Secara keseluruhan terdapat 7,81 persen penduduk Kepulauan Riau yang mengalami keluhan kesehatan hingga menyebabkan terganggu aktivitas sehari-hari. Kabupaten Lingga menjadi kabupaten dengan persentase tertinggi 16,61 persen penduduknya yang mengalami keluhan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari.

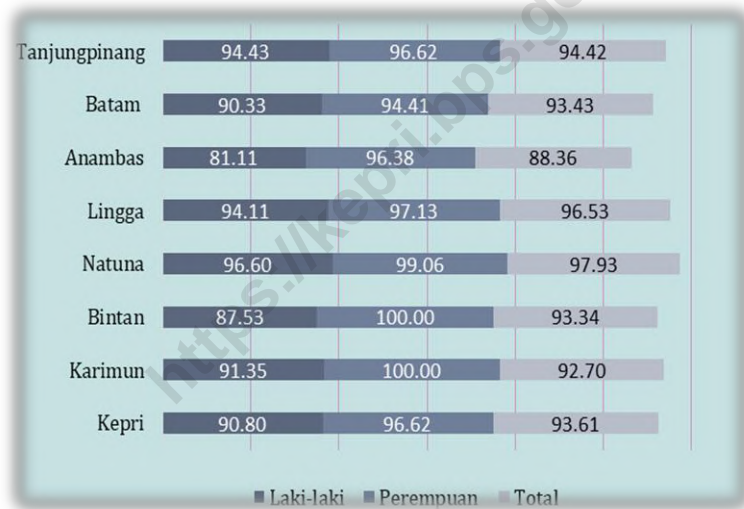
2.3. Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

Salah satu faktor penting pertumbuhan dan perkembangan balita adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI), karena ASI merupakan zat makanan yang paling ideal terutama untuk pertumbuhan bayi, selain itu juga mengandung zat pembentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret tahun 2020 menunjukkan bahwa sekitar 93,61 persen bayi usia di bawah 2 tahun (baduta) di Provinsi Kepri pernah diberi

ASI. Kabupaten/kota yang memiliki persentase baduta yang pernah diberi ASI lebih tinggi dibandingkan dengan angka provinsi adalah Lingga, Tanjungpinang, dan Natuna.

Gambar 2.5. Persentase Baduta yang Pernah Diberi ASI menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau, 2020



Sumber Data : BPS data olahan, Susenas Maret 2020

Untuk mencegah berbagai penyakit menular, pemerintah memberikan beberapa antigen untuk balita dan anak-anak. Adapun antigen yang dianggap penting adalah BCG, DPT, Polio, dan Campak untuk mencegah penyakit yang

biasanya menyerang anak-anak yang diduga dapat menyebabkan kematian pada bayi. Dari Tabel 2.3 diketahui bahwa balita di Provinsi Kepulauan Riau yang pernah diberikan imunisasi campak masih di bawah 80 persen.

Tabel 2.3 Persentase Balita yang Pernah Diimunisasi menurut Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau, 2020

Kab/Kota	BCG	DPT	Polio	Campak	Hepatitis B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Karimun	92,65	91,98	92,65	69,65	89,45
Bintan	82,96	82,68	86,68	65,06	86,12
Natuna	85,86	72,78	84,43	56,63	68,03
Lingga	97,33	89,62	96,25	71,63	94,54
Kep. Anambas	97,28	91,95	97,28	86,72	97,28
Batam	90,21	89,42	93,81	67,51	94,03
Tanjungpinang	91,73	92,53	93,04	77,39	93,39
Kepulauan Riau	90,22	89,22	93,22	68,36	92,85

Sumber Data : BPS, Kepulauan Riau Dalam Angka 2020

2.4. Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal mereka berada. Pada Tabel 2.5, diketahui bahwa penduduk di Kepulauan Riau pada tahun 2020 lebih banyak yang berobat

jalan ke Puskesmas/Pustu sebesar 32,23 persen. Jika dirinci menurut kabupaten/kota, maka pada tahun 2020 penduduk Kota Batam yang mayoritas tinggal di daerah perkotaan lebih banyak ke klinik/praktek dokter bersama yang menjadi tempat rujukannya dalam berobat jalan yaitu sebesar 31,95 persen.

Tabel 2.4. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat di Kepulauan Riau, 2020

Kab/Kota	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktek Dokter/ Bidan	Klinik/ Praktek Dokter Bersama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Karimun	17,51	3,79	12,34	14,03
Bintan	28,97	1,95	16,62	8,11
Natuna	17,33	0,00	20,98	8,13
Lingga	5,20	0,59	26,79	2,94
Kep. Anambas	15,33	0,86	23,44	26,98
Batam	3,85	19,33	20,55	31,95
Tanjungpinang	18,29	2,68	22,89	11,30
Kepulauan Riau	9,42	12,08	20,20	22,83

Lanjutan Tabel 2.4.

Kab/Kota	Puskesmas/ Pustu	UKBM	Praktek Batra/ Alternatif	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Karimun	46,91	6,89	0,22	0,44
Bintan	39,57	5,18	2,87	0,33
Natuna	52,77	0,73	11,48	0,73
Lingga	39,88	28,59	0,17	1,60
Kep. Anambas	37,41	3,56	1,43	1,39
Batam	22,76	3,88	0,50	0,95
Tanjungpinang	48,47	0,85	0,78	0,00
Kepulauan Riau	32,23	5,73	1,04	0,79

Sumber Data : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020

3

PENDIDIKAN

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Kepulauan Riau, 2020



Profesi 0,06%



Diploma 3,2%



SMK 6,77%



Tidak punya Ijazah
9,00%



s1/2/3 9,17%



SD 15,99%



SMP 17,33%



SMA 38,48%

BAB III

PENDIDIKAN

3.1. Pendahuluan

Pembangunan pendidikan sejak tahun 1980-an ditempuh melalui empat kebijakan pokok yaitu memperoleh kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, pendidikan, efisiensi manajemen, pendidikan dan peningkatan relevansi pendidikan mulai dari anak usia dini sampai dengan usia lanjut.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan oleh pemerintah senantiasa dibarengi dengan perbaikan sistem pendidikan. Gerakan wajib belajar 9 tahun bagi anak usia 7-15 tahun merupakan salah satu bentuk dari usaha yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya program wajib belajar, maka diharapkan mampu meningkatkan partisipasi sekolah bagi anak usia pendidikan dasar, baik untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Sama halnya di bidang kesehatan, dalam bidang pendidikan pun ada kesenjangan, walau tidak terlalu jelas seperti bidang kesehatan. Hasil pendidikan sampai sejauh tertentu akan tergantung pada pengaruh keluarga, khususnya tingkat pendidikan orang tua dan pada ada tidaknya tekanan bagi anak untuk lekas meninggalkan bangku sekolah agar dapat bekerja.

Disamping itu, pencaangan program wajib belajar tersebut juga diikuti dengan pemenuhan sarana dan prasarana fisik yang menunjang kegiatan belajar mengajar seperti didirikannya sekolah-sekolah baru baik di daerah pedesaan maupun perkotaan, atau berupa program beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan kurang mampu. Telah beberapa tahun pemerintah mengadakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program ini merupakan salah satu bentuk nyata dari usaha pemerintah dalam upaya mengurangi angka putus sekolah bagi anak-anak yang kurang mampu, sehingga mereka mempunyai kesempatan yang sama dalam hal pemenuhan kebutuhan akan pendidikan.

Sebagai tindak lanjut dari keseriusan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka Alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau

ke sektor pendidikan nilainya mencapai 20 persen sejak tahun 2007.

3.2. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

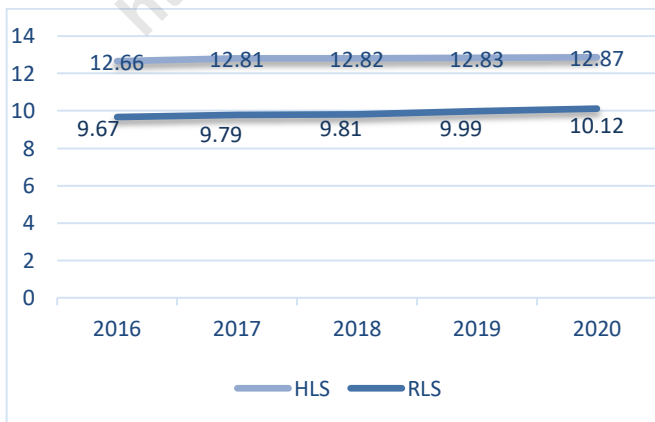
Tingkat kecerdasan dan wawasan seseorang ditentukan oleh tingkat pendidikannya. Pendidikan merupakan modal dasar bagi perkembangan suatu peradaban. Dengan pendidikan yang tinggi, maka peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin terbuka lebar. Dimensi pendidikan lainnya dapat digambarkan dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) atau *Expected Years of Schooling* (EYS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) atau *Mean Years of Schooling* (MYS).

Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2016 hingga 2020, Harapan Lama Sekolah di Kepulauan Riau telah meningkat sebesar 0,21 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah meningkat 0,45 tahun. Selama periode 2016 hingga 2020, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 0,33 persen per tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun

2020, Harapan Lama Sekolah di Kepulauan Riau telah mencapai 12,87 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA.

Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah di Indonesia tumbuh 0,94 persen per tahun selama periode 2016 hingga 2020. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Indonesia yang lebih baik. Hingga tahun 2020, secara rata-rata penduduk Kepulauan Riau usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA kelas I).

Gambar 3.1. HLS dan RLS di Provinsi Kepulauan Riau, 2016 - 2020

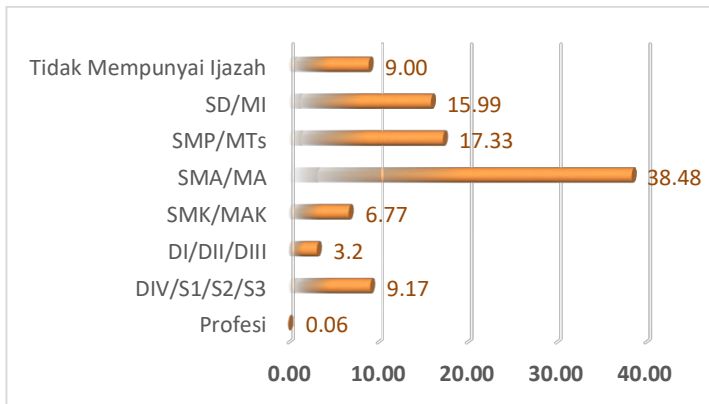


Sumber Data : Website BPS Provinsi Kepulauan Riau, kepri.bps.go.id

3.3. Tingkat Pendidikan

Komitmen 20 persen anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk pendidikan, tercermin dari kondisi pendidikan di tahun 2020. Gambaran mengenai mutu sumber daya manusia dapat dilihat dari ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. Terlihat pada Gambar 3.2, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki adalah tamat SMA sebesar 38,48 persen. Sementara itu, masih ada penduduk yang tidak mempunyai ijazah sama sekali yaitu sebesar 9,00 persen di Kepulauan Riau pada tahun 2020.

Gambar 3.2. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Kepulauan Riau, 2020



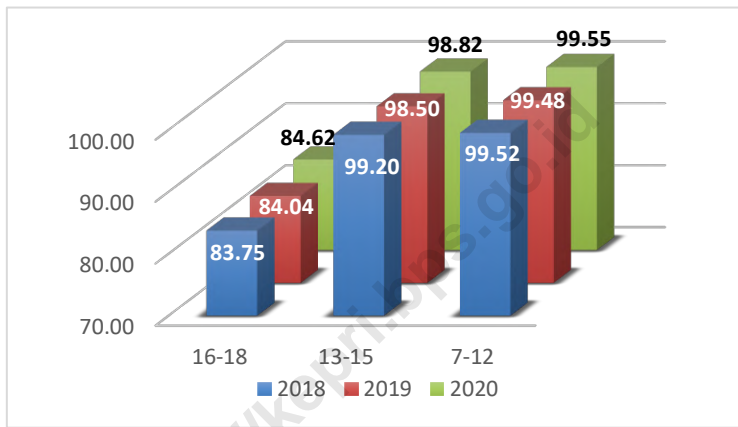
Sumber Data : BPS, Kepulauan Riau Dalam Angka 2021

3.4. Tingkat Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah indikator yang menggambarkan berapa banyak penduduk yang mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan biasanya disebabkan oleh sedikitnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pada Gambar 3.3 terlihat gambaran mengenai APS penduduk usia 7-18 tahun menurut kelompok usia sekolah dan jenis kelamin di Provinsi Kepulauan Riau. Dari gambaran tersebut secara sekilas dapat dilihat bahwa APS tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Riau pada usia Sekolah Dasar (7-12 tahun) sangat universal, yaitu sebesar 99,55 persen, sedikit lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 99,48 persen.

APS penduduk usia SLTP (13-15 tahun) lebih rendah dibandingkan APS penduduk usia 7-12 tahun, yaitu sebesar 98,82 persen sedikit lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 98,50 persen. APS untuk penduduk usia 16-18 tahun tidak terlalu jauh dari harapan, pada tahun 2019 angkanya mencapai 84,04 persen dan pada tahun 2020 sedikit meningkat menjadi 84,62 persen.

Gambar 3.3. APS Usia Penduduk 7-18 Tahun menurut Kelompok Usia Sekolah di Kepulauan Riau, 2018-2020 (%)

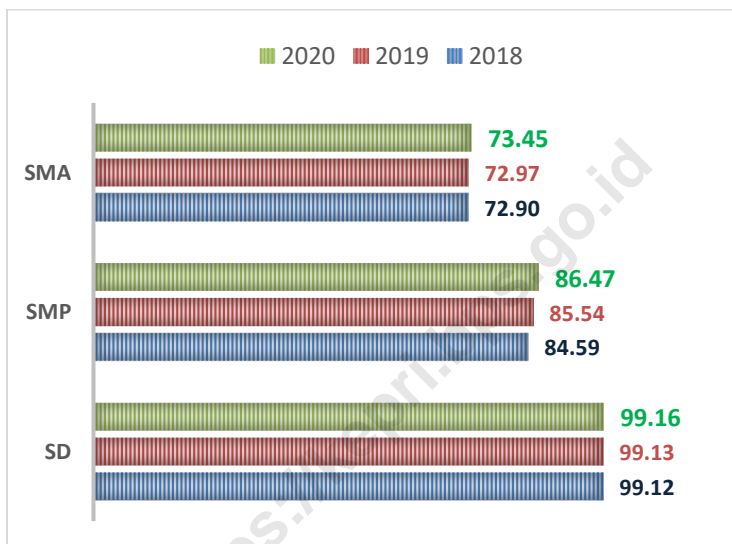


Sumber Data : BPS, Statistik Kesra Provinsi Kepulauan Riau 2018 - 2020

Selain indikator APS, juga digunakan indikator Angka Partisipasi Murni (APM) yang merupakan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya yang bervariasi antara golongan umur maupun jenis kelamin.

Berdasarkan Gambar 3.4, terlihat bahwa secara keseluruhan kelompok usia sekolah baik itu kelompok usia sekolah SD, SMP, maupun SMA di Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan APM pada tahun 2020 dibandingkan dengan APM tahun sebelumnya.

Gambar 3.4. APM Penduduk menurut Kelompok Usia Sekolah di Kepulauan Riau, 2018 - 2020 (%)



Sumber Data : BPS, Statistik Kesra Provinsi Kepulauan Riau 2018-2020

3.5. Kualitas Layanan Pendidikan

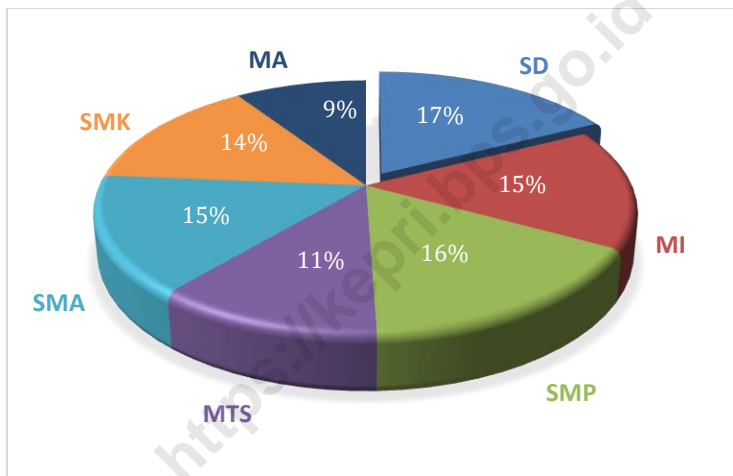
Indikator pendidikan yang lain yang tak kalah pentingnya adalah kualitas pelayanan pendidikan. Kualitas pelayanan pendidikan tersebut dapat diketahui salah satunya dengan tersedianya tenaga pendidik yang memadai dan berkualitas. Indikator yang dapat melihat gambaran tersebut adalah rasio siswa terhadap guru.

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Syarat Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan pada pasal 3 antara lain menyebutkan bahwa standar pelayanan minimal pendidikan dasar adalah jumlah siswa SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs) per kelas antara 30-40 siswa. Begitu juga dengan standar pelayanan minimal pada pendidikan menengah pada pasal 4 menyebutkan bahwa jumlah siswa SMA/Madrasah Aliyah (MA) per kelas antara 30-40 siswa.

Sementara itu, sejak terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pemerintah telah mengatur tentang rasio perbandingan untuk pelayanan guru terhadap siswa pada satuan pendidikan. Dalam pasal 17 ayat 1 disebutkan bahwa guru tetap pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar dengan rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya adalah antara lain sebagai berikut: SD sebesar 20:1; MI sebesar 15:1; SMP sebesar 20:1; MTs sebesar 15:1; SMA sebesar 20:1; MA sebesar 15:1; dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 15:1. Dalam pasal selanjutnya, yakni

pasal 65 dikatakan bahwa aturan ini akan efektif berlaku 10 tahun sejak UU No. 14 Tahun 2005 ditetapkan yang berarti bahwa tahun 2016 telah mutlak diberlakukan.

Gambar 3.5. Rasio Murid Guru di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019/2020



Sumber Data : BPS, Kepulauan Riau Dalam Angka Tahun 2021

Pada Gambar 3.5, diketahui bahwa pada tahun 2020 rasio siswa terhadap guru pada seluruh jenjang pendidikan di Kepulauan Riau belum memenuhi standar pelayanan minimal jika merunut pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004. Begitu juga halnya dengan PP Nomor 74 Tahun 2008, belum memenuhi standar

rasio perbandingan untuk pelayanan guru terhadap siswa yang ideal kecuali di SD dan MI sebesar 17 dan 15 yang telah memenuhi kondisi ideal. Kondisi yang tidak ideal tersebut antara lain disebabkan oleh masih banyaknya sekolah-sekolah di Kepulauan Riau berada di pulau-pulau dan sebagian letaknya terpencil yang memiliki jumlah peserta didik yang sedikit.

<https://kepri.bps.go.id>

4

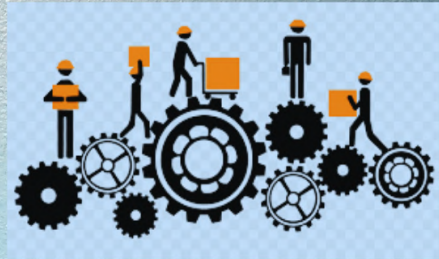
KETENAGAKERJAAN

PERSENTASE PENDUDUK USIA 15 TAHUN
KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT
LAPANGAN KERJA UTAMA

2020



32%
**PERDAGANGAN
DAN AKOMODASI**



25,1%
INDUSTRI



15%
ADMINISTRASI

BAB IV

KETENAGAKERJAAN

4.1. Pendahuluan

Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Permasalahan yang timbul ialah besarnya jumlah angkatan kerja dan memiliki kecenderungan selalu meningkat. Hal ini sejalan dengan transisi demografi yang tengah berlangsung di negeri ini, yaitu semakin menurunnya angka kelahiran maupun angka kematian.

Transisi demografi ini menyebabkan komposisi penduduk sedemikian rupa sehingga penduduk usia produktif meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk secara keseluruhan. Sehubungan dengan itu, pengelolaan ketenagakerjaan sebagai sumber daya pembangunan merupakan hal yang sangat penting mendapat perhatian, karena untuk mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan segala sumber daya yang ada termasuk sumber daya manusia.

Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi merupakan sejumlah orang yang ikut serta dalam kegiatan produksi pada masing-masing sektor ekonomi. Namun, besarnya persentase penduduk yang telah bekerja belum merupakan satu ukuran dalam menentukan apakah masalah ketenagakerjaan dapat dikatakan berhasil. Banyak faktor yang mempengaruhi aspek ketenagakerjaan pada suatu daerah. Selain banyaknya penduduk yang telah terserap dalam kegiatan ekonomi, kualitas dari tenaga kerja tersebut juga akan mempengaruhi *output* produksi.

Adapun klasifikasi seseorang dikatakan telah memasuki usia kerja yaitu ketika seseorang tersebut telah berusia 15 tahun atau lebih. Manakala seseorang tersebut terlibat dalam suatu pekerjaan atau terkategori sebagai pengangguran, maka seseorang itu termasuk dalam angkatan kerja. Yang dimaksud dengan pengangguran di sini ialah seseorang yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha, sudah merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

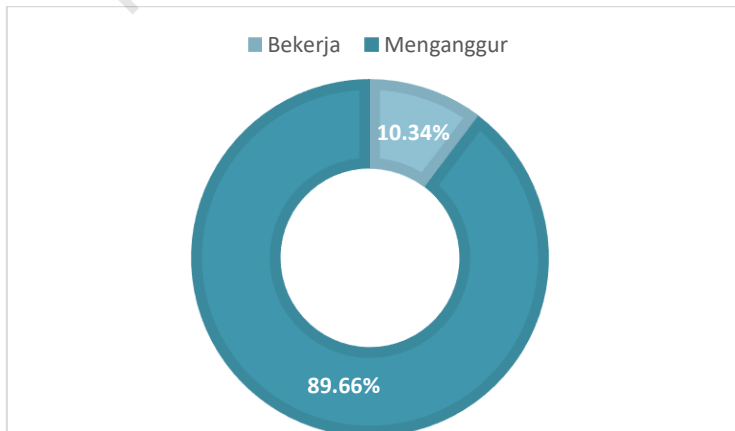
Informasi ketenagakerjaan disusun berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang merupakan

survei dengan pendekatan rumah tangga dan dilaksanakan secara semesteran (Februari dan Agustus).

4.2. Angkatan Kerja

Keadaan ketenagakerjaan di Kepulauan Riau pada Agustus 2020 menunjukkan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 bertambah sebanyak 128.615 orang dibandingkan keadaan Agustus 2019. Angkatan kerja yang masih menganggur sebesar 10,34 persen, sedangkan yang bekerja sebesar 89,66 persen atau dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1. Angkatan Kerja di Kepulauan Riau, Agustus 2020



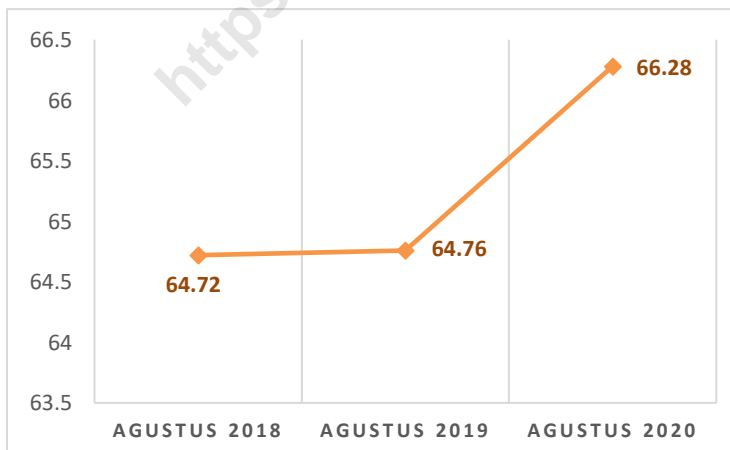
Sumber Data : BPS, Kepulauan Riau Dalam Angka 2021

4.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah proporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk ke dalam angkatan kerja, yakni mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan Sakernas melakukan aktivitas bekerja atau mencari pekerjaan.

Data hasil Sakernas menunjukkan bahwa TPAK di Kepulauan Riau mengalami kenaikan dari 64,76 persen pada Agustus 2019 menjadi 66,28 pada Agustus 2020 atau dapat dilihat pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2. TPAK di Kepulauan Riau, Agustus 2018 - 2020



Sumber Data : BPS, Kepulauan Riau Dalam Angka 2019-2021

4.4. Penduduk yang Bekerja

Penduduk yang bekerja pada Agustus 2020 berjumlah 1.016.600 atau bertambah sebanyak 27.783 orang dibanding keadaan setahun yang lalu (Agustus 2019).

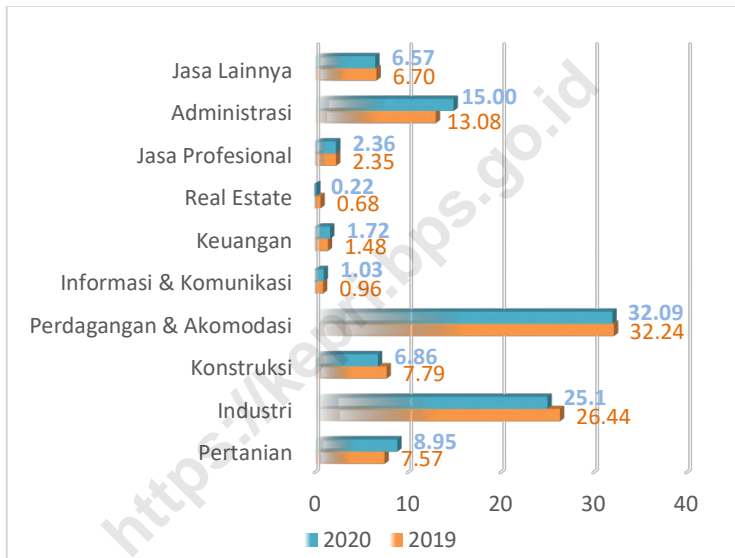
4.4.1 Lapangan Pekerjaan

Komposisi penyebaran jumlah pekerja di suatu wilayah menurut lapangan pekerjaannya menunjukkan pada sisi mana kegiatan ekonomi wilayah tersebut bertumpu. Lapangan usaha penduduk yang bekerja dibagi dalam tiga kelompok yaitu Pertanian (*Agriculture*), Industri (*Manufacture*), dan Jasa (*Service*). *Agriculture* terdiri atas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan. *Manufacture* terdiri atas Pertambangan dan Penggalian; Industri; Listrik, Gas, dan Air; serta Konstruksi. *Service* terdiri atas Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi; Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi; Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan; serta Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan.

Kondisi ketenagakerjaan baik menyangkut tingkat pengangguran dan penduduk yang bekerja tidak terlepas dari kinerja sektor-sektor perekonomian yang ada. Jumlah penduduk yang bekerja pada tiap sektor menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor Perdagangan, sektor industri, sektor pemerintahan dan sektor pertanian secara berurutan menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Riau.

Jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2019, jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan pada beberapa sektor, yaitu sektor pertanian naik 1,38 persen, sektor informasi dan komunikasi 0,07 persen, sektor keuangan 0,24 persen, sektor jasa profesional 0,01 persen dan sektor administrasi pelayanan publik 1,92 persen. Sedangkan sektor yang mengalami penurunan adalah sektor industri turun 1,34 persen, sektor konstruksi 0,93 persen, sektor perdagangan dan akomodasi 0,15 persen, sektor real estate 0,46 persen, dan sektor jasa lainnya 0,13 persen atau dapat dilihat pada Gambar 4.3.

Gambar 4.3. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kepulauan Riau, Agustus 2019 dan Agustus 2020 (%)



Sumber Data : BPS, Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Kepulauan Riau 2020

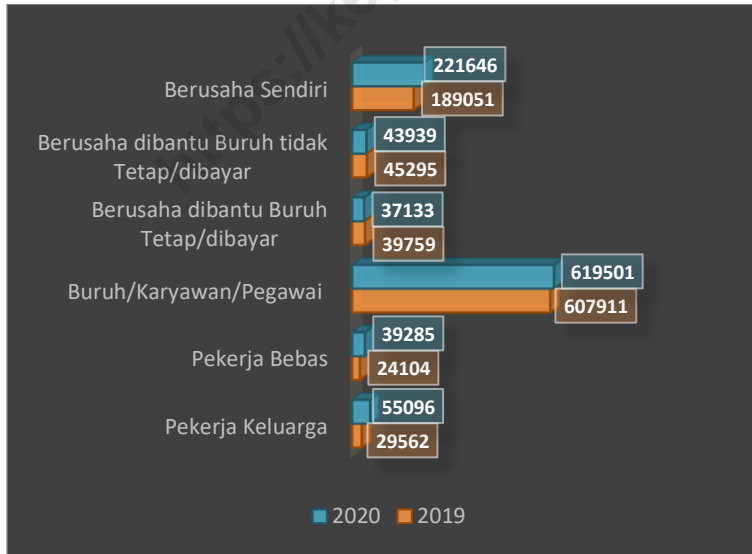
4.4.2 Status Pekerjaan

Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk yang bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sisanya termasuk

pekerja informal. Berdasarkan identifikasi ini, maka pada Agustus 2019 sebesar 64,59 persen bekerja pada kegiatan formal dan sisanya 35,41 persen bekerja pada kegiatan informal.

Dalam kurun setahun terakhir (Agustus 2019 — Agustus 2020), penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri bertambah sebanyak 32.595 orang.

Gambar 4.4. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama di Kepulauan Riau, Agustus 2019 dan Agustus 2020 (Orang)

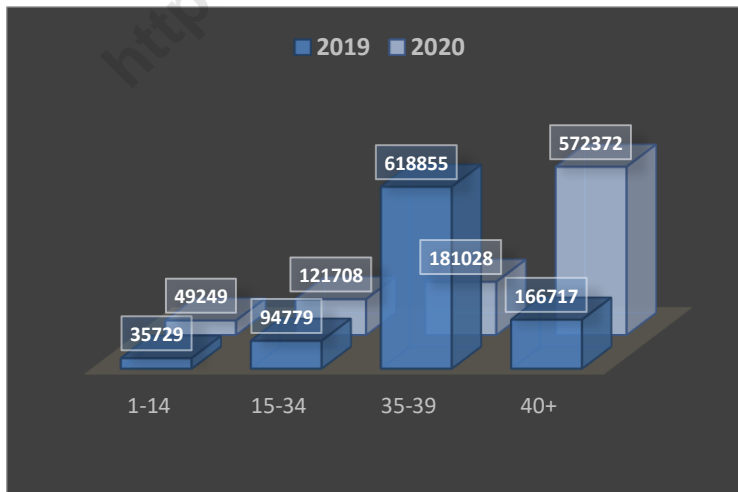


Sumber Data : BPS, Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Kepulauan Riau 2019 dan 2020

4.4.3 Jam Kerja

Secara umum, komposisi jumlah penduduk yang bekerja menurut jam kerja seluruhnya selama seminggu yang lalu mengalami perubahan berarti dari waktu ke waktu. Penduduk yang dianggap sebagai pekerja penuh waktu (*full time worker*), yaitu penduduk yang bekerja pada kelompok 35 jam ke atas per minggu, pada Agustus 2020 jumlahnya mencapai 81,51 persen.

Gambar 4.5. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja per Minggu di Kepulauan Riau, Agustus 2019 dan Agustus 2020 (Orang)



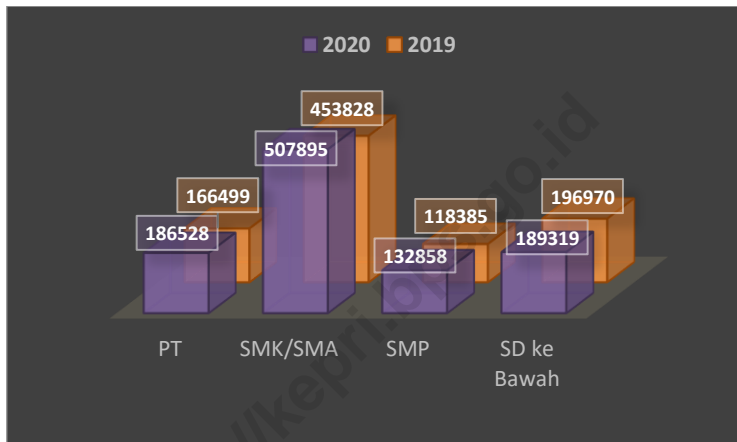
Sumber Data : BPS, Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Kepulauan Riau 2019 dan 2020

Sementara itu, dalam setahun terakhir pekerja tidak penuh (jumlah jam kerja kurang dari 35 jam per minggu) bertambah sebanyak 40.449 orang (23,66 persen) yaitu dari 130.508 orang pada Agustus 2019 menjadi 170.957 orang pada Agustus 2020. Lebih spesifik, penduduk yang bekerja dengan jam kerja sangat rendah yaitu kurang dari 15 jam per minggu pada Agustus 2020 mencapai 49.249 orang (5,33 persen).

4.4.4 Pendidikan

Penyerapan tenaga kerja Agustus 2020 didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Dasar ke bawah sebanyak 189.319 orang (18,62 persen) dan Sekolah Menengah Atas sebanyak 507.895 orang (49,96 persen). Sementara itu, penduduk berpendidikan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 132.858 orang (13,07 persen). Penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi yaitu penduduk yang menamatkan pendidikan pada perguruan tinggi sebanyak 186.528 orang (18,34 persen).

Gambar 4.6. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kepulauan Riau, Agustus 2019 dan Agustus 2020 (Orang)



Sumber Data : BPS, Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Tahun 2020

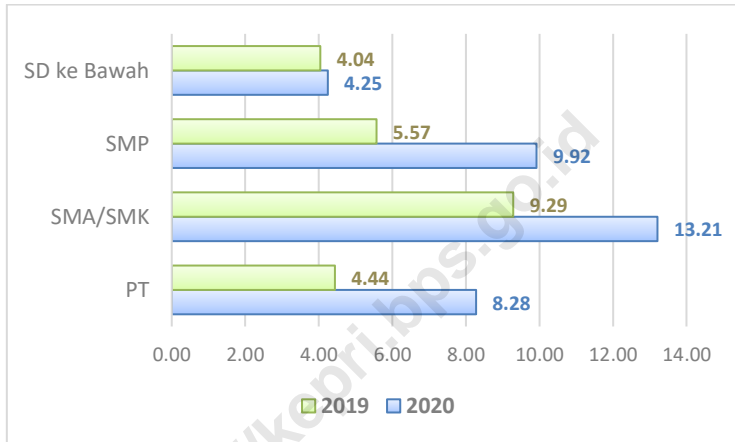
4.5 Tingkat Pengangguran

Salah satu permasalahan ketenagakerjaan yang sedang dihadapi Indonesia yaitu peningkatan penawaran tenaga kerja yang tidak diikuti oleh kesempatan kerja. Demikian pula yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau, kondisi tersebut tidak jauh berbeda. Sebagai dampak yang dihasilkannya, kelebihan penawaran tenaga kerja tersebut memunculkan pengangguran. Jumlah pengangguran pada Agustus 2020 mencapai 117.176 orang, dengan Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat, dimana TPT Agustus 2019 sebesar 6,91 persen meningkat sebesar 3,43 persen poin apabila dibandingkan dengan Agustus 2019, dimana TPT Agustus 2020 sebesar 10,34 persen.

Adapun jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka pengangguran dengan pendidikan terakhir yang ditamatkan adalah SMA/ sederajat mengalami peningkatan jumlah penganggur paling tinggi dibandingkan dengan pendidikan yang lain. Tahun 2019 penganggur dengan pendidikan terakhir SMA sebesar 26,00 persen meningkat hingga 32,73 persen pada tahun 2020. Semua tingkat pendidikan mengalami peningkatan untuk pengangguran dari tahun 2019 ke 2020. Secara rinci dapat dilihat pada gambar 4.7 di bawah ini.

Gambar 4.7. TPT Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kepulauan Riau, Agustus 2019 dan Agustus 2020 (%)



Sumber Data : BPS, Kadaan Angkatan Kerja Tahun 2019 dan 2020

5

TARAF DAN POLA KONSUMSI

PERSENTASE PENGELUARAN PENDUDUK PER KAPITA SEBULAN, 2020



MAKANAN, 45%

NON MAKANAN, 55%

BAB V

TARAF DAN POLA KONSUMSI

5.1. Pengeluaran Rumah Tangga

Determinan dari kesejahteraan ekonomi adalah kemampuan daya beli penduduk. Penurunan kemampuan daya beli akan mengurangi kemampuan pemenuhan kebutuhan pokok. Secara umum, pengeluaran per kapita penduduk per bulan untuk Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 sebesar Rp 1.773.521,- persentase untuk makanan 45,13 persen dan 54,87 persen untuk non makanan atau dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.

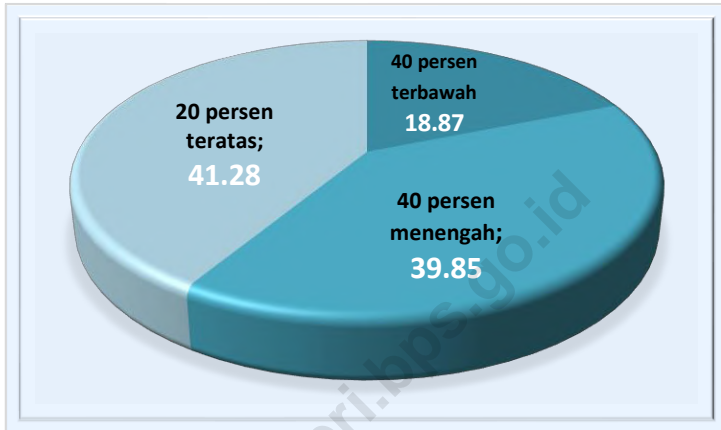
Tabel 5.1 Persentase Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan Per Kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran di Kepulauan Riau, 2020

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran per Kapita Sebulan	
	Nominal (Rp)	Persentase
(1)	(2)	(5)
Makanan	800 424	45,13
Bukan Makanan	973 097	54,87
• Perumahan	523 078	29,49
• Barang & Jasa	243 243	13,72
• Barang Tahan Lama	69 631	3,93
• Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	55 352	3,12
• Pajak, Pungutan dan Asuransi	63 386	3,57
• Keperluan Pesta dan Upacara	18 407	1,04
Jumlah	1 773 521	100,00

Sumber Data : BPS, Kepulauan Riau Dalam Angka 2021

Pada Gambar 5.1, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,87 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Sedangkan 20 persen teratas sebesar 41,28 persen dan 40 persen menengah sebesar 39,85 persen.

Gambar 5.1. Proporsi Pengeluaran Penduduk Provinsi Kepulauan Riau menurut Kuantil, 2020 (%)

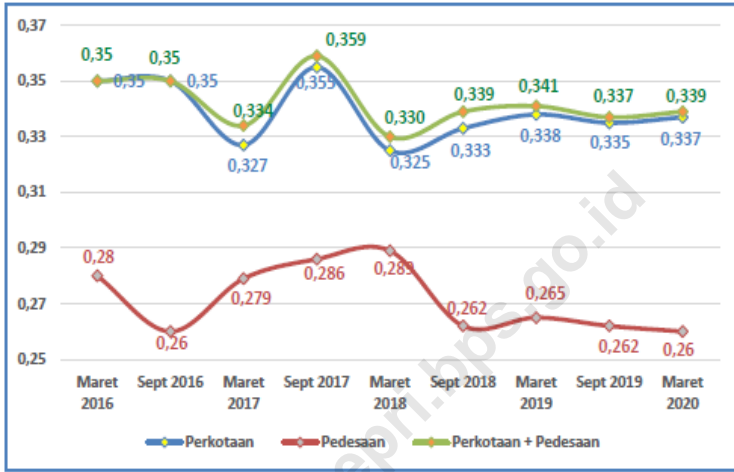


Sumber Data : BPS, BRS Kemiskinan Maret 2020

Ukuran lain untuk melihat apakah distribusi pendapatan penduduk Provinsi Kepulauan Riau timpang atau tidak adalah *Gini Ratio*. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai *Gini Ratio*, menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

Pada Gambar 5.2 dapat dilihat bahwa *Gini Ratio* pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,341 dan turun menjadi 0,339 pada Maret 2020. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau semakin rendah dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dari trend *gini ratio* yang semakin menurun.

Gambar 5.2. Perkembangan *Gini Ratio*, Maret 2016 - Maret 2020



Sumber Data : BPS, Berita Resmi Statistik Kemiskinan 2020

5.2. Konsumsi Kalori dan Protein

Indikator lain yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk adalah tingkat kecukupan gizi yang dihitung berdasarkan kandungan kalori dan protein makanan yang dikonsumsi penduduk. Besarnya konsumsi kalori dan protein dihitung dengan mengkonversikan kuantitas makanan yang dikonsumsi ke dalam kalori atau protein setiap komoditas makanan yang dikonsumsi kemudian dijumlahkan.

Berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) 2012, angka kecukupan kalori penduduk Indonesia

adalah 2.150 kkal per orang per hari sedangkan angka kecukupan protein berdasarkan WNPG 2004 adalah sebesar 57 gram per orang per hari.

Tabel 5.2 Rata-Rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari menurut Daerah Tempat Tinggal di Kepulauan Riau, 2019 - 2020

Daerah Tempat Tinggal	2019		2020	
	Kalori*	Protein**	Kalori*	Protein**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	2 128,52	66,31	2 149,96	70,42
Perdesaan	2 153,68	61,50	2 053,92	60,07
Perkotaan + Perdesaan	2 131,06	65,83	2 140,41	69,39

Sumber Data : BPS, Kepulauan Riau Dalam Angka 2020

*dalam kkal; **dalam gram

Pada tahun 2020, besarnya rata-rata konsumsi kalori masyarakat Provinsi Kepulauan Riau sebesar 2.140,41 kkal per kapita per hari atau dapat dilihat pada Tabel 5.2. Besarnya rata-rata konsumsi tersebut berada di bawah standar kecukupan gizi menurut WNPG 2012. Namun, angka konsumsi kalori tersebut justru meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 2.131,06 kkal per kapita per hari.

Jika dibandingkan antara perkotaan dan pedesaan, maka terlihat bahwa daerah pedesaan mempunyai konsumsi kalori yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan pada tahun 2020. Selain konsumsi kalori, konsumsi protein juga digunakan untuk *proxy* terhadap kesejahteraan rumah tangga. Rata-rata konsumsi protein per kapita per hari pada tahun 2020 di Kepulauan Riau sebesar 69,39 gram per kapita per hari lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 65,83 gram per kapita per hari. Angka ini cukup tinggi melebihi standar kecukupan gizi nasional WNPNG 2004.

Pada Tabel 5.2, terlihat bahwa konsumsi protein penduduk di perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan di pedesaan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan tingkat pendapatan (yang diukur dari pengeluaran) penduduk perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. Pada pendapatan rendah prioritas utama penduduk adalah pangan yang mengandung energi yang cukup. Sejalan dengan meningkatnya pendapatan, maka pada umumnya konsumsi penduduk akan bergeser ke arah pangan yang lebih mahal serta mengandung protein.

6

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

99,68%

penerangan listrik

82,78%

air minum ledeng dan listrik

91,50%

air minum bersih

90,24%

jamban sendiri dengan tangki septik

BAB VI

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

6.1. Pendahuluan

Manusia dan alam lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial, merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan fisik dapat berupa alam sekitar yang alamiah, maupun buatan manusia. Alam sekitar yang kelihatannya sangat alamiah, kadang sewaktu-waktu dapat menjadi sangat ganas. Untuk itu, manusia menciptakan tempat perlindungan berupa rumah atau tempat tinggal. Manusia sebagai makhluk sosial, secara alamiah pula mempunyai keinginan untuk hidup bersama dengan orang lain, sehingga berkumpul pulalah beberapa bangunan rumah tinggal dan terbentuklah suatu pemukiman rumah penduduk.

Rumah tinggal merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia sepanjang hidupnya selain kebutuhan sandang dan pangan. Sehingga rumah dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh manusia agar dapat terus bertahan hidup. Jika kebutuhan primer

tersebut tidak dapat dipenuhi, maka mereka akan sangat sulit untuk dapat hidup secara layak.

Rumah, selain sebagai tempat untuk berteduh dan berlindung, baik dari hujan maupun panas, juga diperlukan untuk memberi rasa aman bagi penghuninya dari gangguan yang tidak diinginkan. Selain itu, rumah juga merupakan tempat berkumpul bagi para penghuninya, yang biasanya merupakan satu ikatan keluarga. Lebih jauh lagi, rumah juga dapat dijadikan sebagai salah satu indikator tingkat kesejahteraan pemiliknya. Semakin baik fasilitas yang dimiliki, dapat diasumsikan semakin baik pula tingkat kesejahteraan penghuninya. Beberapa fasilitas perumahan yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga adalah luas lantai rumah, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan tempat penampungan kotoran atau tinja.

Hasil Susenas 2020 tidak dapat secara maksimal menerangkan berbagai fasilitas perumahan seperti yang disebutkan di atas, hal ini karena beberapa item penting yang berkaitan dengan pertanyaan pada survei tersebut, utamanya yang berkaitan dengan keterangan tentang perumahan tidak tersedia.

6.2. Kualitas Rumah Tinggal

Rumah merupakan tempat berkumpul bagi semua anggota keluarga serta sebagai tempat untuk menghabiskan sebagian besar waktunya. Karenanya, kondisi rumah sangat berperan dalam menentukan tingkat kesehatan para penghuninya, rumah yang tidak sehat dapat menjadi media penularan penyakit bagi anggota rumah tangga yang menghuninya atau bahkan bagi para tetangga di sekitarnya.

Salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai kondisi kesehatan perumahan diantaranya adalah luas lantai rumah atau tempat tinggal. Luas lantai rumah tempat tinggal selain digunakan sebagai indikator untuk menilai kemampuan sosial masyarakat, secara tidak langsung juga dapat dikaitkan dengan sistem kesehatan lingkungan keluarga atau tempat tinggal (perumahan).

Luas lantai erat kaitannya dengan tingkat kepadatan hunian atau rata-rata luas ruang untuk setiap anggota keluarga. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 6,69 persen rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau yang tinggal di rumah yang relatif sempit, yaitu kurang dari atau sama dengan 19 m² per anggota rumah tangga atau dapat dilihat pada Tabel

6.1. Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, ternyata persentasenya bervariasi, Kota Batam yang paling tinggi persentasenya, yaitu mencapai 9,22 persen.

Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kepulauan Riau, 2020

Kabupaten/ Kota	Persentase Rumah Tangga dengan			
	Luas lantai <= 19 m ²	Lantai Tanah	Atap Layak*)	Dinding Permanen (Tembok)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Karimun	1,10	0,60	97,57	82,98
Bintan	2,13	0,66	99,48	90,12
Natuna	1,24	0,00	98,97	47,23
Lingga	1,32	0,02	97,09	32,91
Kep.Anambas	2,98	0,05	97,40	28,13
Batam	9,22	0,10	100,00	86,60
Tanjungpinang	3,75	0,23	98,11	86,07
Kep. Riau	6,69	0,19	99,34	81,78

Sumber Data : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020

Selain dari luas lantai, jenis lantai juga dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kualitas perumahan. Semakin baik kualitas lantai perumahan dapat diasumsikan semakin membaik tingkat kesejahteraan penghuninya. Rumah tangga dengan jenis lantai keramik atau

marmer menggambarkan bahwa penghuninya mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik dari pada rumah tangga yang menggunakan jenis lantai semen, ubin, atau tanah.

Selain itu, jenis lantai rumah juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan penghuninya. Semakin banyak rumah tangga yang mendiami rumah dengan jenis lantai tanah, maka berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Karena lantai tanah dapat menjadi media yang subur bagi timbulnya kuman penyakit dan media penularan bagi jenis penyakit tertentu, seperti diare, cacangan dan penyakit kulit.

Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 0,19 persen rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau yang masih menggunakan tanah sebagai lantainya. Relatif kecilnya persentase rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau yang menggunakan lantai tanah tersebut diduga karena pada umumnya mereka menggunakan lantai yang terbuat dari papan atau kayu, utamanya yang tinggal di pulau-pulau atau di pinggiran laut.

Indikator kualitas perumahan yang lain diantaranya adalah rumah tinggal dengan atap yang layak. Pada tahun 2020, banyaknya rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau

yang tinggal di rumah dengan atap yang layak (tidak beratap dedaunan atau atap lainnya) mencapai 99,34 persen. Jika dirinci menurut kabupaten/kota angkanya bervariasi, persentase atap layak tertinggi adalah Kota Batam, yaitu mencapai 100 persen, sedangkan yang paling kecil persentasenya adalah Kabupaten Lingga yaitu sebesar 97,09 persen.

Rumah tinggal dengan dinding permanen (dinding tembok) di Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 81,78 persen pada tahun 2020, jika dilihat persentasenya per kabupaten/kota, yang paling rendah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga yang masing-masing sebesar 28,13 persen dan 32,91 persen.

6.3. Kelengkapan Fasilitas Pokok Rumah

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah yang terdapat pada Tabel 6.2 akan menentukan nyaman atau tidaknya suatu rumah tinggal dan juga menentukan kualitas suatu rumah tinggal. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk dijadikan tempat tinggal antara lain adalah tersedianya sarana penerangan listrik, air bersih, serta jamban dengan tangki septik. Pada

tahun 2020 tercatat sebesar 99,68 persen rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan, yang berarti masih ada sebanyak 0,32 persen rumah tangga yang belum menikmati fasilitas listrik. Untuk Kota Batam dan Kota Tanjungpinang, angkanya sudah di atas angka provinsi, sedangkan kabupaten/kota lain masih di bawah angka Provinsi Kepulauan Riau.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan air bersih dalam jumlah yang cukup, terutama untuk keperluan minum dan masak, merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Pada tahun 2020, rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau yang menggunakan air ledeng (termasuk air kemasan) sebagai sumber air minum sudah mencapai 82,78 persen. Sementara itu, bila dilihat menurut kabupaten/kota, maka hanya Kota Batam saja yang angkanya sudah di atas angka provinsi, sedangkan kabupaten/kota lainnya angkanya masih relatif rendah. Sementara itu, rumah tangga pengguna air bersih (bersumber dari air isi ulang, ledeng, kemasan, dan pompa, sumur/mata air terlindung) pada tahun 2020 tercatat sebesar 95,25 persen.

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kepulauan Riau, 2020

Kabupaten/ Kota	Persentase Rumah Tangga dengan			
	Penerangan Listrik	Air Minum Ledeng & Kemasan	Air Minum Bersih	Jamban Sendiri dengan Tangki Septik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Karimun	99,18	49,09	76,69	96,66
Bintan	99,62	42,08	74,00	75,99
Natuna	99,07	61,90	85,49	62,70
Lingga	96,75	44,78	58,53	68,99
Kep.Anambas	98,45	53,24	58,76	25,68
Batam	99,99	98,30	99,10	95,70
Tanjungpinang	99,94	72,21	91,13	88,41
Kep. Riau	99,68	82,78	91,50	90,24

Sumber Data : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020

Sistem pembuangan kotoran/air besar manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan suatu penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Klasifikasi sarana pembuangan kotoran dilakukan berdasarkan atas tingkat resiko pencemaran yang mungkin ditimbulkan. Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan, terutama

dikaitkan dengan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana.

Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Pada tahun 2020, banyaknya rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki jamban sendiri dengan tangki septik baru mencapai 90,01 persen. Sementara itu, bila dilihat menurut kabupaten/kota, Kota Batam dan Kabupaten Karimun yang sudah berada di atas nilai Provinsi Kepulauan Riau.

7

KEMISKINAN

ANGKA KEMISKINAN

6,13%

GARIS KEMISKINAN

614.727

INDIKATOR
KEMISKINAN,
MARET 2020

INDEKS KEDALAMAN
KEMISKINAN
1,10%

INDEKS KEPARAHAN
KEMISKINAN
0,28%



BAB VII KEMISKINAN

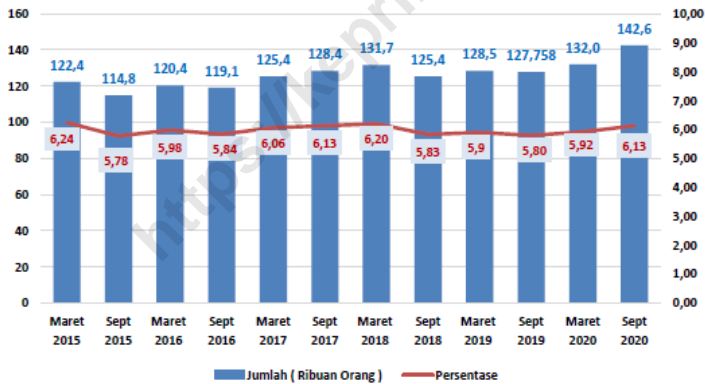
7.1. Perkembangan Penduduk Miskin

Dalam berbagai literatur, kemiskinan selalu didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya, seperti: pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, maka kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Berdasarkan hasil Susenas yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2020, sebanyak 6,13 persen penduduk Provinsi Kepulauan Riau dapat digolongkan sebagai penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau dari Maret 2019 ke September 2019 menurun sebesar 700 ribu orang, yaitu dari 128,46 ribu orang pada Maret 2019 berkurang menjadi 127,76 ribu orang pada September 2019

dengan persentase berkurang sebesar 0,10 poin yaitu 5,90 persen pada Maret 2019 turun menjadi 5,80 persen pada September 2019. Kemudian naik kembali menjadi 5,92 persen pada Maret 2020 dan kembali naik pada September 2020 sebesar 6,13 persen. Angka kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2014 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada Gambar 7.1

Gambar 7.1 Angka Kemiskinan Kepulauan Riau, Maret 2015 - September 2020



Sumber Data : BPS, Berita Resmi Statistik Kemiskinan 2020

7.2. Garis Kemiskinan

Kemiskinan absolut pada umumnya diukur dengan menggunakan Garis Kemiskinan (GK). Banyak sedikitnya

jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK. Selama periode Maret 2020 – September 2020, kenaikan GK sebesar 0,46 persen, yaitu dari Rp 614.727,- per kapita per bulan pada Maret 2020 menjadi Rp 617.532,- per kapita per bulan pada September 2020.

Dengan memperhatikan komponen GK, yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditas makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2020 sebesar 66,52 persen.

Tabel 7.1 Garis Kemiskinan menurut Makanan dan Bukan Makanan, 2019-2020

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kap/bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Maret 2019	396 007	198 052	594 059
September 2019	400 070	201 968	602 038
Maret 2020	410 225	204 502	614 727
September 2020	410 811	206 721	617 532

Sumber Data : BPS, Berita Resmi Statistik Kemiskinan 2020

Berdasarkan BRS Profil Kemiskinan Propinsi Kepri September 2020, komoditas makanan yang paling penting bagi penduduk miskin di daerah perkotaan adalah beras. Pada September 2020, sumbangan pengeluaran beras terhadap GKM di daerah perkotaan sebesar 12,70 persen dan di daerah perdesaan sebesar 17,95 persen. Komoditas yang menyumbang paling besar kedua terhadap GKM adalah rokok, yaitu sebesar 14,05 persen di perkotaan dan 17,77 persen di perdesaan.

Tabel 7.2 Struktur Pengeluaran Rumah Tangga Miskin menurut Perkotaan dan Pedesaan, September 2020 (Persen)

Jenis komoditi (1)	Perkotaan (2)	Jenis komoditi (3)	Perdesaan (4)
Makanan:	65,89	Makanan:	74,30
Rokok kretek filter	14,05	Beras	17,95
Beras	12,70	Rokok kretek filter	17,77
Cabe merah	5,69	Gula pasir	3,64
Daging ayam ras	3,39	Telur ayam ras	3,41
Telur ayam ras	3,21	Daging sapi	3,39
Tongkol/tuna/cakalang	2,53	Kue basah	3,16
Kue basah	2,27	Tongkol/tuna/cakalang	3,14
Cabe rawit	1,81	Cabe rawit	2,71
Kerupuk mentah	1,58	Bawang merah	2,36
Gula pasir	1,49	Mie instan	2,15
Mie instan	1,42	Daging ayam ras	1,53
Kembung	1,32	Tepung terigu	1,31
Lainnya	14,43	Lainnya	11,80
Bukan Makanan:	34,11	Bukan Makanan:	25,70
Perumahan	10,04	Perumahan	8,51
Listrik	5,37	Listrik	3,38
Bensin	4,00	Bensin	2,31
Pendidikan	2,32	Pendidikan	2,31
Air	1,56	Pakaian jadi perempuan dewasa	1,22
Perlengkapan mandi	1,37	Pakaian jadi laki-laki dewasa	1,07
Perawatan kulit, muka, kuku, rambut	1,35	Perlengkapan mandi	1,05
Lainnya	8,09	Lainnya	5,84

Sumber Data : BPS, Berita Resmi Statistik Kemiskinan 2020

Biaya perumahan mempunyai peranan yang cukup besar terhadap GKBM, yaitu 10,04 persen di perkotaan dan 8,51 persen di perdesaan. Komoditas bukan makanan lainnya yang berpengaruh cukup besar pada GKBM, antara lain: biaya yang dikeluarkan untuk listrik (5,37 persen di perkotaan, 3,38 persen di perdesaan), bensin (4,00 persen di perkotaan, 2,31 persen di perdesaan). Biaya pendidikan menempati urutan ke empat baik di perkotaan maupun perdesaan, masing-masing sebesar 2,32 persen dan 2,31 persen.

7.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan pengentasan kemiskinan juga sekaligus harus mampu mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode September 2019 - September 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan

Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2019 adalah 0,900 dan pada September 2020 mengalami peningkatan menjadi 1,213. Demikian pula halnya dengan Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,180 menjadi 0,423 pada periode yang sama.

Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada Maret 2020, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 1,024 sementara di daerah perdesaan sebesar 1,844. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan adalah 0,268 sedangkan di daerah perdesaan sebesar 0,435. selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 7.3.

Tabel 7.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), September 2019-September 2020

Tahun	Perkotaan	Pedesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan			
September 2019	0,832	1,508	0,900
Maret 2020	1,024	1,844	1,106
September 2020	1,155	1,88	1,213
Indeks Keparahan Kemiskinan			
September 2019	0,160	0,353	0,180
Maret 2020	0,268	0,435	0,285
September 2020	0,415	0,513	0,423

Sumber Data : BPS, Berita Resmi Statistik Kemiskinan 2020

8

SOSIAL LAINNYA

PKH

5,7%

BPNT

5,8%



**PERSENTASE PENERIMA
BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH, 2020**

PRA KERJA

0,01%

KPS/KKS

8,39%

PEMDA

5,97%

BAB VIII SOSIAL LAINNYA

8.1. Pendahuluan

Aspek sosial lainnya yang dibahas pada bab ini utamanya yang berhubungan dengan kegiatan yang dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk. Pada umumnya semakin banyak seseorang memanfaatkan waktu luang untuk melakukan kegiatan sosial budaya maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut memiliki tingkat kesejahteraan yang semakin baik, karena waktu yang ada tidak hanya digunakan untuk mencari nafkah.

8.2. Perlindungan Sosial

Kartu Perlindungan Sosial adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial dalam rangka program percepatan dan perluasan sosial. Kartu ini berfungsi untuk membantu meringankan hidup rakyat miskin. Pada tahun 2020, penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki dan dapat menunjukkan kartu KPS/KKS adalah sebesar 4,72 persen. Jika dirinci menurut kabupaten/kota, maka penduduk Kabupaten Lingga adalah yang terbesar

memiliki dan dapat menunjukkan kartu yaitu sebesar 9,34 persen. Sedangkan untuk Provinsi Kepulauan Riau, yang memiliki tapi tidak bisa menunjukkan kartu sebesar 3,67 persen. Kepulauan Anambas menjadi kabupaten yang warganya menerima KPS dan dapat ditunjukkan paling kecil yaitu 2,33 persen. Secara detail dapat dilihat pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1 Persentase Penduduk yang Menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam Setahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau, 2020

Kabupaten/ Kota	Ya, Dapat Menunjukkan Kartu	Ya, Tidak Dapat Menunjukkan Kartu	Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)
Karimun	4,75	0,62	94,63
Bintan	4,39	1,94	93,67
Natuna	2,94	3,73	93,33
Lingga	9,34	3,11	87,55
Kep.Anambas	2,33	0,63	97,04
Batam	4,42	4,44	91,14
Tanjungpinang	6,12	3,68	90,20
Kepulauan Riau	4,72	3,67	91,61

Sumber Data : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020

8.3. Akses pada Informasi

Kegiatan masyarakat pada umumnya adalah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan akses pada informasi seperti menonton televisi, mendengarkan radio, membaca surat kabar, dan mengakses internet. Pada sub bab ini, karena keterbatasan data hasil Susenas 2020, maka hanya dapat disajikan informasi mengenai penduduk yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir.

Pada tahun 2020 seperti yang terlihat pada Tabel 8.2, menunjukkan bahwa penduduk yang mengakses internet selama 3 bulan terakhir di Kepulauan Riau sebesar 67,72 persen. Jika dirinci menurut kabupaten/kota, maka masih didominasi oleh penduduk Kota Batam dan Kota Tanjungpinang dalam mengakses internet selama 3 bulan terakhir yaitu masing-masing sebesar 74,07 persen dan 69,56 persen. Sementara itu, untuk penduduk Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengakses internet selama 3 bulan terakhir yaitu masing-masing 37,21 persen dan 43,96 persen. Kondisi tersebut memang masih dimaklumi mengingat kedua kabupaten tersebut masih belum memiliki sarana dan prasarana telekomunikasi yang memadai.

Tabel 8.2 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Mengakses Internet selama 3 Bulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau, 2020

Kabupaten/ Kota	Jenis Kelamin		L + P
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Karimun	54,05	52,61	53,35
Bintan	66,42	61,85	64,20
Natuna	52,26	49,00	50,67
Lingga	40,79	33,50	37,21
Kep. Anambas	46,20	41,57	43,96
Batam	75,53	72,53	74,07
Tanjungpinang	71,34	67,75	69,56
Kepulauan Riau	69,31	66,06	67,72

Sumber Data : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020

8.4. Keadaan Sosial Ekonomi Rumah Tangga

Selain dari aspek kesejahteraan yang dilihat dari kegiatan dan akses ke media massa, bab ini juga menerangkan tentang keadaan sosial ekonomi rumah tangga, di antaranya pada aspek yang berkaitan dengan banyaknya rumah tangga yang menerima program atau bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan rumah tangga yang menerima kredit usaha.

Tabel 8.3 Persentase Rumah Tangga yang Pernah Menerima Program Keluarga Harapan (PKH) Selama 1 Tahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau, 2020

Kabupaten/ Kota	Apakah Pernah Menerima PKH		Total
	Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)
Karimun	6,00	94,00	100
Bintan	6,24	93,76	100
Natuna	5,80	94,20	100
Lingga	9,00	91,00	100
Kep. Anambas	2,55	97,45	100
Batam	5,00	95,00	100
Tanjungpinang	8,93	91,07	100
Kepulauan Riau	5,70	94,30	100

Sumber Data : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020

Hasil Susenas 2020 menyebutkan bahwa ada sebesar 5,70 persen rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau yang pernah mendapat PKH selama 1 tahun terakhir. Jika dilihat persentase rumah tangga yang menerima PKH antar kabupaten/kota, maka rumah tangga yang memiliki persentase rumah tangga lebih besar dari angka provinsi ada lima kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Karimun (6,00 persen),

Kabupaten Bintan (6,24 persen), Kabupaten Lingga (9,00 persen), dan Kabupaten Natuna (5,80 persen), dan Kota Tanjungpinang (8,93 persen) atau dapat dilihat pada Tabel 8.3.

Dari 5,70 persen rumah tangga yang menyatakan pernah menerima PKH selama 1 tahun terakhir, ternyata sebanyak 29,48 persennya menerima PKH di ATM, ada sebanyak 27,86 persen yang menerima PKH di kantor bank, dan 21,75 persen di agen bank.

Tabel 8.4 Persentase Rumah Tangga yang Pernah Menerima Bantuan/Program Perlindungan Sosial dari Pemerintah di Kepulauan Riau, 2020 (Persen)

Kabupaten/Kota	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Kartu Prakerja	Bantuan/Subsidi dari Pemerintah Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
Karimun	6,95	0,00	1,35
Bintan	5,39	0,00	2,60
Natuna	5,94	0,00	80,39
Lingga	13,45	0,00	6,59
Kep. Anambas	2,84	0,00	58,28
Batam	4,39	0,00	1,78
Tanjungpinang	12,26	0,16	4,15
Kepulauan Riau	5,84	0,01	5,97

Sumber Data : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020

Pada Tabel 8.5, rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau yang pernah menerima kredit usaha selama satu tahun terakhir pada tahun 2020 sebesar 20,96 persen rumah tangga. Sementara itu, jenis kredit yang paling banyak diterima di Kepulauan Riau pada tahun 2020 adalah *leasing* yaitu sebesar 30,61 persen.

Tabel 8.5 Persentase Rumah Tangga yang Pernah dan Tidak Menerima Kredit Usaha Selama Satu Tahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota Kepulauan Riau, 2020

Kabupaten/ Kota	Apakah Terima Kredit Usaha		Total
	Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)
Karimun	11,48	88,52	100
Bintan	25,72	74,28	100
Natuna	21,64	78,36	100
Lingga	15,54	84,46	100
Kep. Anambas	10,80	89,20	100
Batam	21,88	78,12	100
Tanjungpinang	25,33	74,67	100
Kepulauan Riau	20,96	79,04	100

Sumber Data : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020

8.5. Tindak Kejahatan

Kesejahteraan suatu masyarakat dapat terganggu jika mengalami korban tindak kejahatan. Secara umum dari Tabel 8.6 menunjukkan bahwa sebanyak 1,02 persen penduduk di Kepulauan Riau pada tahun 2020 menjadi korban tindak kejahatan selama setahun terakhir. Jika dirinci menurut kabupaten/kota, maka penduduk yang menjadi korban tindak kejahatan terbanyak adalah di Kota Batam yaitu sebesar 1,39 persen.

Tabel 8.6 Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Setahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Kepulauan Riau, 2020

Kabupaten/ Kota	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Karimun	0,10	0,14	0,12
Bintan	0,42	0,26	0,34
Natuna	0,21	0,00	0,11
Lingga	0,13	0,27	0,20
Kep. Anambas	0,69	0,54	0,61
Batam	1,80	0,96	1,39
Tanjungpinang	1,31	0,45	0,89
Kepulauan Riau	1,33	0,71	1,02

Sumber Data : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Jl. A. Yani No. 21 Tanjungpinang 29124
Telp: (0771) 4500155

Homepage: kepri.bps.go.id Email: bps2100@bps.go.id

ISSN 2442-6199



9 772442 619003